



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	17 (tujuh belas)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Sabang.
Hari, Tanggal	:	Kamis, 2 September 2021
Pukul	:	16.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Gde Sumarjaya Linggih, S.E, M.A.P, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020; 2. Progress Realisasi Anggaran TA 2021; dan 3. Pembahasan RKA KL TA 2022.
Hadir	:	1. 24 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Kepala BPKS Sabang; b. Bapak/Ibu pendamping yang sudah bergabung di virtual beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKS Sabang pada pukul 18.53 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Sabang pada hari Kamis, 2 September 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, S.E, M.A.P.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Neraca Keuangan BPKS Tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited) tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan DIPA Pagu Tahun Anggaran 2020 Revisi ke - 4 per tanggal 25 November 2020 berjumlah Rp. 110.143.715.000,- (seratus sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran senilai Rp. 71.730.782.618,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 65,12 persen.
3. Komisi VI DPR RI juga telah mendapatkan penjelasan BPKS atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited) dan menyetujui usulan Pagu DIPA untuk Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 senilai Rp. 2.014.726.020,- (dua milyar empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah), dengan realisasi total belanja senilai Rp. 1.860.891.270,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 92,4 persen dengan rincian realisasi:
 - a. Belanja barang senilai Rp. 563.870.020 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah); dan
 - b. Belanja modal senilai Rp. 1.297.021.250 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan BPKS tentang rencana Pagu RKA K/L untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 77.473.783.000,- (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Pagu Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) Program yaitu :
 - a. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp. 35.792.013.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga belas ribu rupiah).
 - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 41.681.770.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

5. Dalam hal Pengusulan Pagu RKA K/L BPKS Tahun Anggaran 2022 telah memperhitungkan:
 - a. Anggaran gaji dan tunjangan bulan ke-13 dan THR;
 - b. Anggaran untuk membiayai seluruh biaya penyelenggaraan program/kegiatan prioritas sampai dengan proyek prioritas dan penunjang dalam Tahun Anggaran 2022;
 - c. Dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] BLU.

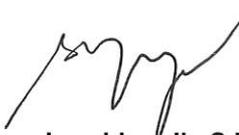
6. Komisi VI menyetujui alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] BPKS pada usulan Pagu RKA K/L untuk Tahun Anggaran 2022 juga mengusulkan kegiatan Prioritas Nasional (PN) senilai Rp. 8.035.765.000,- (delapan milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dimana masing-masing usulan kegiatan Prioritas Nasional tersebut untuk mendukung rencana kerja Pemerintah yaitu Prioritas Nasional-2 (Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dalam RPJMN yaitu:
 - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Aroih Lampuyang;
 - b. Peningkatan Diversifikasi dan Intensifikasi Kepelabuhanan.

7. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan Anggaran di Tahun 2022 Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah) yang penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan di Pulo Breuh sebesar Rp.17.930.000.000 (Tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Pengawasan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan di Pulo Breuh sebesar Rp.540.000.000 (Lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - c. Mobilisasi Dan Pemeliharaan Tugboat (Hibah dari LMAN) sebesar Rp.1.530.000.000 (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**


Gde Sumarjaya Linggih, S.E, M.A.P.
A-327